

## **PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN POTENSI PARIWISATA BUNTU BURAKE DI KABUPATEN TANA TORAJA**

**Ratna Medi**

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri  
Makassar

Email: (ratnamedi96@gmail.com)

### **Abstrak**

*Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata Religi Buntu Burake di Kabupaten Tana Toraja. Skripsi. Fakultas ilmu sosial Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Dr. Muh. Nr Yamin, M.Si dan Dra. Hj. Herlina Sakawati, M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam mengelola potensi pariwisata Religi Buntu Burake di Kabupaten Tana Toraja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknis observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, pemilihan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi pariwisata Religi Buntu Burake di kabupaten Tana Toraja di tinjau dari peran pemerintah dalam pembangunan (1) koordinator (2) fasilitator (3) stimulator (4) motivator bahwa pemerintah sudah melakukan perannya dalam mengelolah objek wisata yang ada di kabupaten tana toraja.*

Kata Kunci: Peran, Pengelolaan, Potensi Pariwisata

### **A. PENDAHULUAN**

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha atau bisnis atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

Pariwisata pada dasarnya merupakan merupakan produk aktivitas yang berupa pelayanan atas produk yang dihasilkan oleh industry pariwisata yang mampu menciptakan pengalaman perjalan bagi wisatwan.<sup>1</sup>

Selain dari pengertian di atas pariwisata juga merupakan salah satu aspek yang berperan penting dalam meningkatkan pendapatan di setiap

---

<sup>1</sup> Muljadi, andri warman. 2014.

*Kepariwisataan dan perjalanan*. Jakarta: Pt RajaGrafindo persada, hal 8

daerah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan, kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Sebagai salah satu aspek yang berpotensi dalam meningkatkan pendapatan daerah, pariwisata harus dikembangkan dengan baik. Untuk itu perlu adanya peran dari pemerintah dalam pengelolaannya. Pengelolaan pariwisata harus merupakan pengelolaan yang terencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, dan kultural.

Peran pemerintah dalam mengembangkan dan mengelola pariwisata secara garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparat pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum ke daerah lain maupun ke luar negeri. Pemerintah mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan, dan peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata. Tidak hanya itu, pemerintah bertanggung jawab dalam menentukan arah yang dituju perjalanan pariwisata. Kebijakan makro yang ditempuh pemerintah merupakan panduan bagi stakeholder yang lain di dalam memainkan peran masing-masing. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 UU Nomor 10 Tahun 2009 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara:

- a. membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata

- untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
- b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.<sup>2</sup>

Model pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata daerah yang diusulkan untuk diterapkan dalam pengembangan potensi wisata yang ada di kabupaten Tana Toraja mengacu pada kondisi aktual saat ini berupa potensi dan wisata alam. Untuk mengembangkan wisata-wisata terdapat stakeholder yang terlibat (pemerintah, lembaga non pemerintah), SDM, program-program, dana dan fasilitas. Berdasarkan keterlibatan stakeholders dan berdasarkan berdasar kondisi saat ini di dapatkan program-program yang diharapkan dapat memberikan arahan yang jelas dalam upaya pengembangan daerah tujuan wisata di kabupaten Tana Toraja ke depannya. Sasaran tersebut dapat tercapai melalui pengelolaan dan pengusahaan yang benar dan terkoordinasi, baik lintas sektoral maupun swasta yang berkaitan dengan pengembangan kegiatan pariwisata sehingga di perlukan dukungan serta peran dari masyarakat dan pemerintah dan seluruh sektor yang berperan kepariwisataan. Keberhasilan pelaksanaan pengembangan daerah tujuan wisata tidak terlepas dari peran semua elemen, tentunya dengan memperhatikan unsur program, anggaran dan proses yang sudah ada.

---

<sup>2</sup> Undang- undang No. 10 Tahun 2009. Pasal 17. Tentang kepariwisataan

Jika melihat kondisi fisik pariwisata yang ada di Tana Toraja saat ini pengelolaannya sudah bagus. Keunikan Toraja sebagai pilihan daerah wisata baik untuk wisatawan asing dan dalam negeri tersebut, saat ini sudah didukung dengan infrastruktur yang memadai. Akses jalan yang dilalui di beberapa tempat wisata sudah bagus. Selain itu fasilitas di setiap tempat wisata sudah memadai seperti tempat penginapan yang dekat dengan lokasi wisata, kamar mandi (toilet). Namun kekurangan lainnya adalah tidak di sediakannya panduan tertulis seputar wisata setempat memberinya ketidaktahuan akan fungsi dan sejarah obyek-obyek wisata yang ada. Alangkah baiknya jika dibangun pusat riset yang juga menyediakan banyak pemandu dan mencetak buku panduan secara berkala. Selain itu pemerintah juga belum melibatkan pihak swasta ataupun investor dalam pengelolaan pariwisata sedangkan kerjasamaa sama antar pihak swasta dan investor sangat penting demi kemajuan potensi wisata di setiap daerah.

Pengelolaan potensi pariwisata di daerah ini menjadi perhatian khusus pemerintah daerah, hal ini tercermin dalam arah kebijakan (visi) pemerintah bahwa tujuan utama pembangunan pariwisata adalah menjadikan Tana Toraja sebagai destinasi kedua setelah Bali. Di sisi lain, dukungan masyarakat Tana Toraja sangat positif memberikan respon pengembangan pariwisata. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di ambil judul penelitian yaitu **“Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Pariwisata Religi**

**Buntu Burake Di Kabupaten Tana Toraja”**. Permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi pariwisata Religi Buntu Burake di Kabupaten Tana Toraja?. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi pariwisata Religi Buntu Burake di Kabupaten Tana Toraja.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **a. Pengertian Peran**

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Kita selalu menulis kata peran tetapi kadang kita sulit mengartikan dan definisi peran tersebut. Peran biasa juga disandingkan dengan fungsi.

Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat. Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku.<sup>3</sup>

Berdasarkan cara memperolehnya, peran dapat dibedakan menjadi 2 hal berikut ini:

- 1) Peranan bawaan (*ascribed roles*), yaitu peranan yang diperoleh secara otomatis,

---

<sup>3</sup> Syarbani dan fatkhuri. 2016. Teori Sosiologi. Bogor: Ghadia Indonesia, hal 113

bukan karena usahanya. Misalnya peranan sebagai nenek, anak dan sebagainya

- 2) Perananan pilihan (*achieves roles*), peranan yang diperoleh atas dasar keputusannya sendiri, misalnya memutuskan untuk memilih kuliah di program studi matematika.<sup>4</sup>

## **b. Pengelolaan**

Menurut Leiper dalam Gde Pitana, Diarta (2009) pengelolaan merujuk pada seperangkat peranan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, atau bisa juga merujuk pada fungsi-fungsi yang melekat pada peran tersebut. Fungsi-fungsi manajemen tersebut yaitu:<sup>5</sup>

- a. *Planning* (perencanaan)
- b. *Directing* (mengarahkan)
- c. *Organizing* (termasuk coordinating)
- d. *Controlling* (pengawasan)<sup>6</sup>

Menurut Terry (2009) pengelolaan (*management*) adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Sejalan dengan Terry, Oey Liang Lee dalam Suprpto (2009), juga mendefinisikan manajemen sebagai seni perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengontrolan atas *human and national resources* (terutama *human resources*) untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan lebih dahulu. Pengelolaan merupakan suatu proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

## **c. Pariwisata dan Kepariwisata**

### **1. Konsep Pariwisata**

Oraganisasi pariwisata dunia, mendefenisikan pariwisata sebagai aktivitas perjalanan dan tinggal seorangng di luar tempat tinggal dan lingkungannya selama tidak lebih dari satu tahun berurutan untuk berwisata, bisnis atau tujuan lain dengan tidak untuk bekerja ditempat yang dikunjungi tersebut.<sup>7</sup>

Murphy dalam Sedarmayanti (2014) pariwisata adalah Keseluruhan dari elemen-elemen terkait (wisatawan, daerah tujuan wisata, perjalanan, industry, dan lain-lain) yang merupakan akibat dari perjalanan ke daerah tujuan wisata, sepanjang perjalanan tersebut tidak permanen<sup>8</sup>.

Ada beberapa komponen pokok yang secara umum disepakati di dalam memberi batasan mengenai pariwisata :

- 1) Traveler. Orang yang melakukan perjalanan antar dua atau lebih lokalitas
- 2) Orang yang melakukan perjalanan, ke daerah yang bukan merupakan tempat tinggalnya, kurang dari 12 bulan, dan tujuan

---

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup>Gde pitama, Surya Diarta. 2009. *Pengantatr ilmu pariwisata*. Yogyakarta: penerbit Andi, hal 80

<sup>6</sup> <sup>6</sup>Gde pitama, Surya Diarta. 2009. *Pengantatr ilmu pariwisata*. Yogyakarta: penerbit Andi, hal 80

---

<sup>7</sup> Liga suryadana, vanny. 2015. *Pengantar pemasaran pariwisata*. Cetakan ke 1. Bandung : Alvabeta. hal 30

<sup>8</sup> Sedarmayanti. Op. cit. hal 45

perjalannya bukan untuk terlibat dalam kegiatan untuk mencari nafka, pendapatan atau penghidupan di tempat tujuan.

- 3) Touris. Bagian dari visitor yang menghabiskan waktu paling tidak 1 malam di daerah yang di kunjungi<sup>9</sup>.

Menurut Mill dan Morison dalam Liga suryana (2015) pariwisata terkait erat dengan aktivitas perpindahan tempat yang merupakan sebuah system dimana bagian-bagian yang tidak berdiri sendiri melainkan saling terkait satu sama lain seperti jarring laba-laba.

Sistem pariwisata menurut Mathieson dan Wall dalam Pitadan Dan Gayatri (2005) terdiri dari :

- 1) Elemen dinamis yaitu perjalanan dinamis
- 2) Elemen statis yaitu keberadaan di destinasi
- 3) Elemen konsekuensial yaitu berbagai dampak yang timbul.<sup>10</sup>

## 2. Kepariwisataaan

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 1, Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.<sup>11</sup>

Menurut Muljadi dan Warman (2014) prasarana kepariwisataan adalah

semua fasilitas yang mendukung sarana kepariwisataan yang dapat memberikan pelayanan kepada wisatawan dalam memenuhi kebutuhan mereka, antara lain:

- 1) Prasarana perhubungan, seperti jaringan jalan raya dan jaringan rel kereta api, Bandar udara, pelabuhan laut, terminal angkutan darat dan stasiun kereta api.
- 2) Instalasi tenaga listrik dan instalasi air bersih
- 3) Sistem perbankan moneter Sistem telekomunikasi.<sup>12</sup>

## 3. Produk pariwisata

Produk pariwisata merupakan suatu bentukan yang nyata dan tidak nyata dikemas dalam suatu kesatuan rangkaian perjalanan yang hanya dapat dinikmati apabila seluruh rangkaian perjalan tersebut dapat memberikan pengalaman yang baik bagi orang yang melakukan atau menggunakan produk tersebut. Sehingga bentuk dari produk itu pada hakikatnya adalah tidak nyata, karena suatu rangkaian perjalanan terdapat berbagai macam unsur yang saling melengkapi, tergantung pada jenis perjalanan yang di lakukan oleh wisatawan.

Mason dan Poerwanto dalam Suryadana dan Octavia (2015) membuat rumusan tentang komponen komponen produk pariwisata yaitu: 1) Aksesibilitas, 2) amenities, 3) networking, yaitu daya tarik wisata, baik alam budaya maupun buatan manusia seperti festival atau pentas seni.

Jenis produk pariwisata yang dibutuhkan secara langsung oleh wisatawan adalah terdiri dari berbagai jasa pelayanan, antara lain

---

<sup>9</sup> Ibid.hal 4-5

<sup>10</sup> Gde pitana, dkk.2016. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta : Andi. Hal 93

<sup>11</sup> UU.Nomor 10 tahun 2009. Pasal 1

---

<sup>12</sup> Muljadi dan Warman. Op.cit, hal 13

sebagai berikut: Jasa perjalanan wisata, Jasa transportasi wisata, Jasa penyediaan akomodasi, Jasa penyediaan makanan dan minuman, Jasa daya tarik wisata, Jasa penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, Jasa wisata air, Jasa informasi pariwisata, dan jasa pramuwisata<sup>13</sup>.

#### **d. Potensi Wisata**

Menurut Wiyono (2006) potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terpendam didalamnya yang menunggu untuk diwujudkan menjadi sesuatu kekuatan nyata dalam diri sesuatu tersebut. Menurut Prihadi (2004) potensi biasa disebut sebagai kekuatan, energi, atau kemampuan yang terpendam yang dimiliki dan belum dimanfaatkan secara optimal.

Potensi wisata adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh daerah tujuan wisata, dan merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut. Sedangkan pengertian potensi wisata menurut Sukardi (1998:67), potensi wisata adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah untuk daya tarik wisata dan berguna untuk mengembangkan industri pariwisata di daerah tersebut. Potensi wisata dibagi menjadi tiga macam, yaitu : potensi wisata alam, potensi kebudayaan dan potensi wisata buatan manusia.

#### **E. Prinsip Dasar Pengelolaan Pariwisata**

Pengelolaan pariwisata haruslah mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas dan nilai sosial

yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal.

Menurut Dox (1985) dalam Pitama dan Surya Diarta pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

- 1) Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan *special local sense* yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan
- 2) Konservasi, proteksi dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata
- 3) Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengacu pada khasana budaya lokal
- 4) Pelayanan kepada budaya yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal
- 5) Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif tetapi sebaliknya mengendalikan dan/atau menghentikan aktifitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas (*carrying capacity*) lingkungan alam atau akseptabilitas sosial walaupun di sisi lain mampu meningkatkan pendapatan kepada masyarakat<sup>14</sup>

#### **2. KERANGKA KONSEPTUAL**

Pariwisata merupakan salah satu yang berperan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah.

<sup>13</sup> Ibid, hal 58

<sup>14</sup> Gde Pitama, surya diarta. Op.cit. Hal 81

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan, kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Untuk itu perlu adanya peran pemerintah dalam pengelolaannya.

Mengingat pariwisata sebagai aspek penting dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka pengelolaan dan pengembangannya sangat perlu. Untuk itu perlu adanya peran dari pemerintah dalam pengelolaannya.

Salah satu peran pemerintah dalam mengembangkan dan mengelola pariwisata secara garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum ke daerah lain maupun ke luar negeri. Pemerintah mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan, dan peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata. Tidak hanya itu, pemerintah bertanggung jawab dalam menentukan arah yang dituju perjalanan pariwisata.

#### **4. METODE PENELITIAN**

##### **a. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dimana

permasalahan yang diangkat tidak terungkap melalui data-data statistik tetapi data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata tertulis, lisan atau gambar daripada angka-angka tentang masalah yang diteliti.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Sugiyono (2016) mengemukakan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain<sup>15</sup>. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran/lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai objek yang diteliti dan berusaha melihat fenomena yang terjadi dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya khususnya peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pariwisata.

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja dan beberapa objek wisata. Fokus penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini mengenai peran pemerintah dalam pengelolaan potensi pariwisata yaitu: koordinator, fasilitator, stimulator dan motivator.

Adapun tahapan dalam penelitian ini yaitu; tahap

---

<sup>15</sup>Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta, hal. 11

perencanaan, tahap pelaksanaan penelitian dan tahap hasil penelitian.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data diperoleh langsung terhadap objek penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara sedang data sekunder ialah data yang secara tidak langsung untuk mendukung penulisan pada penelitian.

Informan dalam penelitian ini yaitu pegawai dinas pariwisata kabupaten Tana Toraja dan masyarakat sekitar lokasi objek wisata.

Instrumen peneliti yang digunakan peneliti adalah lembar survei dan lembar pedoman wawancara yang digunakan dalam proses penelitian berlangsung berupa garis besar pertanyaan yang akan diajukan kepada masyarakat atau pelanggan sebagai subjek penelitian.

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan validitas data yang memanfaatkan sesuatu yang berada diluar data itu untuk keperluan pengecekan keabsahan atau perbandingan terhadap data yang sama dari sumber lain. Analisis data dalam penelitian ini kualitatif dilakukan dengan teknik pengolahan data dan analisa secara bersamaan pada proses penelitian. Analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

## **5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pariwisata merupakan salah satu aspek yang berperan penting dalam meningkatkan pendapatan setiap daerah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan menjelaskan bahwa kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan, kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Pengelolaan potensi pariwisata di daerah Tana Toraja menjadi perhatian khusus pemerintah, hal ini tercermin dalam arah kebijakan (visi) pemerintah bahwa tujuan utama pembangunan pariwisata adalah menjadikan sebagai destinasi kedua setelah Bali. Di sisi lain, dukungan masyarakat Tana Toraja sangat positif memberikan respon pengembangan pariwisata.

Sebagai salah satu aspek yang berpotensi dalam meningkatkan pendapatan daerah, pariwisata harus dikelola dengan baik. Untuk itu perlu adanya peran dari pemerintah dalam pengelolaan yang terencana secara menyeluruh.

Dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh ahli tentang pengelolaan pariwisata, maka dari itu pada penelitian ini penulis menggunakan teori pengelolaan pariwisata yang dikemukakan oleh Blakely: koordinator, fasilitator, stimulator, motivator.

### **a. Koordinator**



Sebagai koordinator pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan atau strategi bagi pembangunan daerah dan merangkul semua komponen masyarakat untuk menjadi aktor utama dalam pemabangunan.

Mencakup peran pemerintah selaku pengkoordinasi dan asosiasi di bidang pariwisata selaku penyelenggara pariwisata, baik ditingkat lokal, regional, maupun internasional. Sektor ini biasanya menangani perencanaan dan fungsi manajerial untuk membuat sistem koordinasi antara seluruh sektor dalam industri pariwisata.

#### **b. Fasilitator**

Pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksana pembangunan daerah. Sebagai faslitator pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan serat dibidang pendanaan atau permodalan kepada masyarakat yang di berdayakan

Dalam membangun pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja bertanggung jawab memfasilitasi masyarakat untuk bersama mengelola pariwisata sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam hal sarana dan prasarana yang mendukung efektivitas program atau kegiatan. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata menyediakan lahan untuk masyarkat sekitar objek wisata untuk tempat membuka usaha.

#### **c. Stimulator**

Menurut Blakely Stimulator adalah pemerintah dapat mmenciptakan strategi untuk

membangun objek dan daya tarik wisata. Dinas kebudayaan dan daya tarik wisata menyusun strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka pengembangan objek wisata. Disini pemerintah melibatkan dan bekerjasama dengan masyarakat, dengan membangun sarana seperti tempat untuk berjualan seperti kantin sehingga mendatangkan keuntungan baik untuk pemerintah daerah, masyarakat setempat, dan wisatawan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara Peran Dinas pariwisata Kabupaten Tana Toraja sebagai motivator menstimulasi segenap pemangku kepentingan untuk terlibat dalam pengembangan objek daya tarik wisata. Pemerintah juga melakukan pembinaan kepada masyarakat yang diberdayakan di objek wisata, masyarakat di ajak bagaimana menjaga dan mengelola objek wisata agar tetap lestari dan menarik hati para pengunjung. Namun di sisi lain pemerintah belum melibatkan pihak swasta baik investor atau perusahaan-perusahaan dalam pengelolaan potensi pariwisata yang ada di Tana Toraja. Pemerintah belum melibatkan pihak investor karena pengambil kebijakan di daerah Tana Toraja belum menerima tawaran dari investor.

#### **d. Motivator**

Dalam pembangunan pariwisata peran pemerintah sebagai motivator diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan. Investor, masyarakat serta pengusaha dibidang pariwisata merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat

berjalan dengan baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa proses pengelolaan dan pengembangan pariwisata tidak lepas dari dukungan masyarakat ataupun pengusaha di bidang pariwisata.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peran pemerintah daerah dalam memotivasi masyarakat untuk ikut dalam pengelolaan pariwisata yang dilakukan dengan berbagai upaya seperti : memberdayakan masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata hal ini diwujudkan melalui pemberian lahan kepada masyarakat tanpa memungut biaya, selain itu masyarakat juga di berikan motivasi melalui promosi pemasaran. Upaya pemerintah tersebut mendapat respon baik dari masyarakat.

## **6. PENUTUP**

### **a. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang ini dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah daerah (Dinas Pariwisata) dalam pengelolaan potensi pariwisata di kabupaten Tana Toraja sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata yang mencakup

Koordinator, peran yang dilakukan pemerintah sebagai koordinator yaitu melakukan koordinasi dengan Instansi dan pembuatan strategi. Fasilitator, peran yang dilakukan pemerintah yaitu, menyediakan sarana dan prasarana dan menciptakan strategi promosi. Stabilisator, peran pemerintah sebagai stabilisator belum bagus karena pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata Tana Toraja belum melibatkan pihak investor dan pihak

swasta untuk ikut serta dalam pengelolaan pariwisata, pemerintah hanya melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya. Motivator, peran yang dilakukan pemerintah yaitu: memberdayakan masyarakat.

### **b. Implikasi**

Adapun implikasi dari penelitian ini yaitu, penelitian telah dilakukan di kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja dengan pejabat dan staf juga dilakukan di 4 objek wisata alam untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengelolaan potensi pariwisata yang mencakup peran sebagai koordinator, fasilitator, stimulator, motivator.

### **c. Saran**

Pemerintah daerah lebih meningkatkan lagi kerjasama antar pihak swasta dan investor agar dapat membantu dalam pengembangan dan pengelolaan objek wisata yang ada di Tana Toraja.

Pemerintah daerah khususnya dinas pariwisata diharapkan menyediakan fasilitas yang masih kurang untuk menunjang operasional dan pengelolaan potensi wisata dan untuk menciptakan kenyamanan bagi setiap pengunjung.

## **7. Daftar Pustaka**

Antariksa, Basuki. 2016. *Kebijakan Pembangunan Kepariwisataaan*. Malang: Intrans Publishing

Aziz, Azhari. 2015. *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Herabudin. 2015. *Pengantar Sosiologi*. Bandung: CV Pustaka Setia

Kuncoro Mudrajat. 2004. *Otonomi Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga

Muljadi dan Andri Warman. 2014. *Kepariwisata Dan Perjalanan*. Jakarta: PTRajagrafindo Persada.

Pitana I Gde dan Surya Diarta. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Pitana I Gde dan Gayatri. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: penerbit Andi

Sedarmayanti. 2014. *Membangun & Mengembangkan Kebudayaan & Industry Pariwisata* (Bunga Rampai Tulisan Pariwisata) Bandung: Refika Aditama.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Suryadana Liga Dan Vanny. 2015. *Pengantar Pemasaran Pariwisata*. Cetakan Ke 1. Bandung :Alfabeta

Syarbani, syahril dan Fatkhuri. 2016. *Teori Sosiologi*. Bogor: Ghalia Indonesia

## UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Tentang kepariwisataan

Undnag-undang otonomi daerah No.32 tahun 2004 Pasal 1 Angka 2

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

## SUMBER LAIN

Reski Sirupang. 2014. *Peranan Pemerintah Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata Di Kabupaten Toraja Utara*. Toraja Utara. Universitas Hasanuddin

Tivani, Irene. 2016. *Evaluasi Program Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Tana Toraja*. Tana Toraja. Penerbit Universitas Hasanuddin

